

Vol.3 No.1, Juni 2013

ISSN : 2088-6683

KOMUNIKASI GLOBAL

JURNAL KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH

PERS DI ACEH ANTARA NASIONALISME DAN KEBEBASAN

Erman Anom

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN
ORGANISASI PUBLIK MENURUT PERSEPSI ALUMNI
SEBUAH FAKULTAS DI UNIVERSITAS KEBANGSAAN MALAYSIA**

Chang Peng Kee, Er Ah Choy & Norliana Hashim

**URGENSI MEMPERTAHAKAN WARISAN BUDAYA ACEH
MELALUI PEMBELAJARAN KOMUNIKASI TRADISIONAL
DI PENDIDIKAN TINGGI**

Ade Irma

**PERAN E-GOVERNMENT TERHADAP PEMBANGUNAN
NEGARA DI INDONESIA DALAM KONTEKS
KOMUNIKASI MASSA**

Siti Meisyaroh

POLITICAL REPERTOIRE OF SAMUDERA PASAI KINGDOM

Effendi Hasan & Taufik Abdullah



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH**

ISSN 2088-6683

KOMUNIKASI GLOBAL

Volume 3, Nomor 1, Juni 2013

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah
USK (Universitas Syiah Kuala)

Pengarah

Dr. Syarifuddin Hasyim, SH, M.Hum., Dr. Alamsyah Taher, M.Si.
Dr. Ishak Hasan, M.Si., Drs. Zainal Abidin AW, SH, M.Si.,
Dr. Muhammad Saleh, SH., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rahmat Saleh, S.Sos., M.Comn.

Sekretaris Redaksi

Nur Anisah, M.Si.

Dewan Redaksi

Drs. Amsal Amri., M.Pd, Dr. Hamdany M. Syam, S.Ag. MA.
Rizanna Rosemary, M.Si., MHC, Drs. Martunis Yahya, M.Si.

Mitra Bestari

Dr. A. Rany Usman, M.Si. (IAIN Ar-Raniry)
Dr. Pinkey Triputra (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Erman Anom (Universitas Indonusa Esa Unggul)
Dr. Tuti Widiastuti, M.Si (Universitas Bakrie)

Sekretariat Pelaksana

Drs. Ibnu Jasad, Cut Herlina, SE., Purlina, SE., Riska Agustina

Sirkulasi

Lailawati, AMd, Muzakkir Ali, SE

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)-Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Tanoh Abee, Darussalam, Darussalam Banda Aceh
Telp (0651) 7555 267 Fax (0651) 7555 270
E-mail:komunikasiglobal@yahoo.co.id

ISSN 2088-6683

KOMUNIKASI GLOBAL

Volume 3, Nomor 1, Juni 2013

DAFTAR ISI

- Pers di Aceh Antara Nasionalisme dan Kebebasan
Erman Anom 1 - 8
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Organisasi Publik
Menurut Persepsi Alumni Sebuah Fakultas Di Universitas
Kebangsaan Malaysia
Chang Peng Kee, Er Ah Choy & Norliana Hashim..... 9 - 26
- Urgensi Mempertahankan Warisan Budaya Aceh Melalui
Pembelajaran Komunikasi Tradisional Di Pendidikan Tinggi
Ade Irma 27 - 42
- Peran *E-Government* Terhadap Pembangunan Negara di
Indonesia Dalam Konteks Komunikasi Massa
Siti Meisyaroh 43 - 67
- Political Repertoire of Samudera Pasai Kingdom
Effendi Hasan dan Taufik Abdullah 68- 75

Pers di Aceh Antara Nasionalisme dan Kebebasan

Oleh

Erman Anom

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta

Abstract

Press in Aceh is run out between nationalism and freedom. The reporting news in Aceh during war period from 1976 to 2005 aimed to achieve a consensus in a way to stop conflict and prevent more victims from Acehnese civilians. This research was a desk research that focused on documents review to find out major functions of mass media in picturing the conflict of Aceh during 1976-2005. Some key issues concerning the reporting of conflict were about integration of nation, cover both sides stories of GAM and TNI including the Acenese civilians themselves, enforcement for supreme law, and anti violence campaign in mediating conflict resolution.

Keywords: Aceh's Press, nationalism, freedom, and conflict

Pendahuluan

Kepada siapa pers harus mengabdikan disaat perang di Aceh 1976-2005? Sebuah pertanyaan yang relevan untuk diajukan. Saat ini, ketika perang sedang berkecamuk di Serambi Mekah, muncul harapan-harapan yang mengusik konsentrasi komunitas pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Pers diharapkan bisa bekerjasama dengan TNI dalam meliput konflik Aceh dan turut membantu Pemerintah untuk "menyelesaikan permasalahan Aceh" sesegera mungkin. Membantu di sini berarti tidak mempermasalahkan lagi operasi militer di Aceh, karena opsi ini sudah menjadi keputusan politik pemerintahan yang sah. Pers juga dihimbau untuk memberitakan konflik di Aceh dengan semangat nasionalisme. Sebuah seminar bahkan telah diselenggarakan Lembaga Informasi Nasional (LIN) untuk membahas peranan Pers dalam "nation and character building" 29 Mei 2003. Benarkah pers harus bekerja sama dengan militer dalam kasus Aceh? Benarkah pers harus mendukung keputusan-

keputusan pemerintah, termasuk keputusan untuk perang? Benarkah pers bertanggung jawab terhadap nasionalisme?

Pertanyaan penting yang harus dijawab terlebih dahulu dalam hal ini adalah kehidupan pers macam apakah yang kita kehendaki ke depan. Apakah pers dengan paradigma *developmentalis-otoritarian* seperti halnya pers Orde Baru? Ataukah pers yang benar-benar lain dan baru, pers yang bercorak profesional dan egaliter terhadap kekuasaan?

Pembahasan

Orde Baru adalah periode panjang sejarah di mana pers disubordinasikan kepada kepentingan-kepentingan penguasa. Dengan logika *developmentalis*, pers dipaksa menjadi perangkat politik untuk mensukseskan program pembangunan dan kebijakan-kebijakan penguasa. Rejim Orde Baru terus-menerus mengintrodusir slogan-slogan seperti "pers Pancasila", "pers pembangunan", "pers sebagai pemersatu bangsa", "pers yang bebas dan bertanggung jawab" sebagai mekanisme untuk membatasi ruang gerak pers.

Pers pembangunan adalah pers yang harus senantiasa mengendalikan diri, melakukan self sensorship, dan memastikan bahwa setiap pemberitaan tidak menimbulkan eskalasi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pers Pancasila adalah pers yang harus senantiasa menekankan pentingnya harmoni antara pers, pemerintah. (Jacob Oetama, 1987). Secara paradoksal dapat dikatakan, kritisisme pers diberi kesempatan untuk berkembang, hanya sejauh tidak mengganggu stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan Orde Baru.

Momentum reformasi 1998 kemudian disepakati sebagai titik tolak untuk melakukan "amputasi sejarah", meninggalkan yang lama dan memulai yang baru. Dalam kehidupan pers, ini berarti menanggalkan sistem pers *developmentalis-otoritarian* dengan segala dampak buruknya, serta memproyeksikan diri menjadi pers yang benar-benar bebas dan profesional. Jati diri pers profesional kurang lebih adalah tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran, tidak menjadi alat siapapun kecuali menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan (ekonomi dan politik). Pers profesional senantiasa menjaga jarak kepada siapapun dan berusaha mengembangkan prinsip-prinsip imparzialità.

Pers profesional senantiasa kritis terhadap keadaan dan peka terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Jika hal-hal ini bisa disepakati, tentu saja harapan-harapan di atas menjadi kurang relevan. Pada kasus Aceh, jelas sekali bahwa peranan pers adalah mengontrol penyelenggaraan kekuasaan, termasuk kekuasaan militer, dan melaporkan setiap penyalahgunaan wewenang dan kebohongan terhadap publik yang terjadi. Sudah menjadi tugas pers untuk mempertanyakan relevansi perang itu, mengingatkan akan dampak-dampaknya, dan menyoroti setiap kekerasan baik yang dilakukan TNI maupun GAM.

Dengan kata lain, bukan porsi media untuk mendukung keputusan politik pemerintah dalam kasus Aceh 1976-2005, betapapun telah dilibatkan asumsi-asumsi tentang nasionalisme. Sulit membayangkan, misalnya bagaimana pers harus kritis terhadap militer jika kedua belah pihak saling bekerja sama di tengah-tengah bara perang di Aceh.

Harapan-harapan agar pers bisa bekerja sama dengan pemerintah hanya relevan untuk pers era Orde Baru, atau untuk media-media yang menjadi organ pemerintah seperti TVRI dan RRI (Bahkan menurut UU Penyiaran No. 32/2002, TVRI dan RRI pun harus mengubah diri dari media pemerintah menjadi media publik).

Harapan agar pers mempunyai semangat nasionalisme dalam meliput sebuah peperangan memang menjadi persoalan tersendiri dalam diskursus kebebasan pers dewasa ini. Liputan media AS tentang perang Irak (1991 & 2003) misalnya, dengan jelas menunjukkan bahwa kebebasan pers di negeri Paman Sam ternyata hanya berlaku di luar isu-isu nasionalisme. Jika rasa kebangsaan telah tersentuh, mereka notabene akan berbicara dalam perspektif kepentingan Amerika, *national-security* dan seterusnya. Inilah salah-satu paradoks terbesar dalam sejarah pers Amerika, yang semakin meredupkan pamor mereka sebagai kiblat demokrasi, kiblat kebebasan pers.

Nasionalisme pada kasus lain juga membuat para jurnalis dalam Perang di Balkan tercerai-berai oleh sensibilitas sebagai orang Serbia, orang Kroasia dan

orang Bosnia. Nasionalisme membuat mereka lalai terhadap jati diri sebagai jurnalis dengan segala konsekuensi profesional dan idealistiknya.

Ada apa sesungguhnya dengan nasionalisme? Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, persoalan nasionalisme terletak pada watak partikularistik yang terkandung di dalamnya. Bisa dibandingkan misalnya antara ide-ide dasar nasionalisme dan demokrasi. Keduanya sama-sama mengakui pentingnya penghargaan terhadap hak-hak untuk menentukan nasib sendiri. Bedanya, demokrasi bisa menerima, bahkan mengakomodasi perbedaan-perbedaan. Sementara nasionalisme di sisi lain punya kecenderungan besar untuk mempersoalkan perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain, karena selalu berpikir dalam bingkai negara-bangsa (David Beetham dan Kevin Boyle, 1995).

Dalam nasionalisme, sering muncul tendensi untuk mengingkari hak-hak untuk menentukan nasib sendiri hanya karena perbedaan yang ada. Nasionalisme cenderung berbicara dalam konteks "kita" dan "mereka". Jika ada nasionalisme Indonesia, maka di seberang sana ada etnonasionalisme Aceh. Dan penyelesaian yang diambil pertama-tama bukan dengan mengakomodasi perbedaan itu, melainkan dengan membenturkannya.

Di sinilah letak problem nasionalisme bagi kebebasan pers. Kebebasan pers, sebagaimana demokrasi, adalah prinsip yang universal. Dia tak mengenal batas ruang dan waktu. Ruh dari kebebasan pers adalah penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman, sehingga berkembang terminologi pers sebagai ruang publik (*public sphere*). Setiap orang, setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk berbicara, tanpa memandang perbedaan yang ada. Dalam konteks Aceh, tidak cukup alasan untuk hanya menonjolkan sumber-sumber resmi pemerintah RI dan menafikan sumber-sumber GAM.

Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada pers itu sendiri, namun pada ekspetasi dan preferensi tentang pers yang ternyata belum berubah. Zaman sudah bergerak maju. Kondisi politik sudah jauh berubah. Namun, bagaimana dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian dari kita, terutama yang berada dalam struktur kekuasaan? Jangan-jangan tidak terjadi banyak perubahan. Buktinya, masih ada ilusi tentang pers sebagai "mitra"

pemerintah, perekat kesatuan bangsa, pengabdian nasionalisme dan seterusnya apa ini salah?

Sebuah kemunduran serius jika kontribusi pers bagi bangsa ini masih diukur dari sejauhmana dukungan pers terhadap program/kebijakan Pemerintah. Sumbangsih pers bagi bangsa ini saya kira adalah dengan menunjukkan kepada dunia bahwa kebebasan berbicara, keterbukaan informasi, egalitarianisme politik dan *public scrutiny* benar-benar mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. Bahwa kebebasan pers dan iklim demokrasi di Indonesia bukan sekedar isapan jempol semata.

Untuk menjawab dan pers Indonesia menjadi alat menciptakan sistem masyarakat harmonis sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila, pers Indonesia harus menjadi idealisme untuk membangun bangsa dan nasionalis untuk landasan aktivitasnya harus mengacu pada nilai-nilai sbb:

Untuk terjaminnya Media Massa yang bebas dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat Indonesia perlu dipedomani UU Media dan etika jurnalistik yang ada. Untuk itu media berperan dan mendorong dalam membangun dan menjaga demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai ke Indonesiaan, maka landasan perwujudnya haruslah mempunyai arah dan strategi komunikasi politik yang berorientasi kepada pengembangan media, harus bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dengan dimensi pokok yang harus memaknainya sebagai berikut:

- Dimensi Religius. Proses penguatan dimensi ini dimaksudkan sebagai pemberian peluang bagi individu/masyarakat untuk mengembangkan dorongan keberagaman bagi terwujudnya masyarakat yang etis dan bermoral.
- Dimensi Solidaritas. Terlalu banyak faktor pemisah, baik geografis, etnis (berbagai suku bangsa di Indonesia), maupun tradisi fanatik suku yang terbangun membutuhkan suatu instrumen bagi berkembangnya rasa saling peduli, kepekaan, dan mau tahu. Migrasi secara etnis maupun geografis merupakan program prioritas dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan Indonesia.

- Dimensi Kritis. Pengembangan masyarakat sebagai suatu keluarga seharusnya tidak menghilangkan sikap kritis individu sebagai upaya maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Sikap kritis ini memiliki tiga muatan, yaitu kepekaan, keberanian, dan ketulusan bagi akselerasi pencapaian tujuan masyarakat Indonesia.
- Dimensi Kualitas. Sebagai masyarakat yang memiliki berbagai suku bangsa dan pengkondisian kompetitif mengacu pada suatu acuan yaitu kualitas. Dengan acuan ini, maka keberlindungan dengan kemasam yang menghilangkan kualitas seperti koneksitas, primodialisme sempit, kolusi, korupsi, nepotisme, fanatik kesukuan dan lain-lain dapat terkuat dan menjadi sesuatu yang kedaluarsa.

Teori-teori pers yang ada dikembangkan oleh para sarjana merujuk kepada, bahwa pers harus menjadi alat yang harmonis membangun hubungan pers, pemerintah dan masyarakat dan ini dapat dilihat pada Fungsi sosial media massa.

Penutup

Bagaimana hubungan antara peranan pers dengan usaha memelihara keutuhan dan membangun dan menjaga demokrasi di Indonesia ini khususnya di Aceh? Dalam hal ini kita perlu merenungkan apa yang ditulis oleh ahli komunikasi massa Harold D. Lasswell (1936) mengenai fungsi sosial media massa.

Menurut Harold D. Laswell (1936) ada empat fungsi sosial media massa:

1. Pengamatan sosial (*social surveillance*).

Media massa hendaknya menyebarkan informasi dan interpertasi yang obyektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan melakukan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Korelasi sosial (*social correlation*).

Media massa hendaknya memberikan informasi dan interpretasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus.

3. Sosialisasi (*socialization*).

Media massa hendaknya mewariskan nilai-nilai (yang baik) dari satu generasi ke generasi lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

4. Hiburan (*entertainment*).

Media massa juga mempunyai tugas untuk memberikan hiburan (yang sehat) dan kesenangan kepada masyarakat.

Dari keempat fungsi sosial media massa tadi, maka yang paling menonjol dilakukan oleh media massa di Indonesia dan khususnya di Aceh sekarang adalah fungsi keempat (hiburan), sedangkan ke tiga fungsi sosial yang lain kurang mendapat perhatian.

Dalam hal ini kita mengambil contoh pemberitaan mengenai "konflik", yang akhir-akhir ini sering menempati halaman depan media cetak dan menjadi berita utama media elektronik dan media cetak.

Jika ditilik dari fungsi pengamat sosial media massa, seharusnya berita tentang konflik tadi dikemas sedemikian rupa, agar masyarakat waspada dan mencegah agar konflik tidak meluas dan menghancurkan sistem masyarakat. Sedangkan penyajian opini dari para elit politik atau kelompok yang bertikai, jika ditilik dari fungsi korelasi sosial media massa, seharusnya dikorelasikan dengan opini dari berbagai kalangan masyarakat lainnya baik secara vertikal maupun horisontal.


Hal ini berarti isi pemberitaan tidak hanya menyajikan pandangan atau pernyataan pihak-pihak yang bertikai. Pandangan dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat baik lapisan atas, menengah maupun bawah perlu juga disajikan secara eksplisit termasuk dampak konflik terhadap kehidupan nyata masyarakat.

Tujuannya isi pemberitaan adalah untuk mencapai konsensus agar konflik dapat segera berakhir, karena disadari bersama bahwa yang menjadi korban dari konflik tersebut adalah masyarakat. Sedangkan mengenai fungsi sosialisasi dalam kasus konflik tersebut, media massa hendaknya menyebarluaskan pesan tentang perlunya menjaga integrasi bangsa dalam menghadapi konflik tadi. Dalam hal ini yang sangat relevan adalah mensosialisasikan tentang perlunya toleransi dan apresiasi terhadap perbedaan dalam hubungannya dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), juga tentang perlunya menegakkan supremasi hukum serta anti segala bentuk tindakan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Asiah Sarji. *Pengaruh persekitaran politik dan sosio budaya sistem penyiaran Malaysia dalam perkembangan penyiaran radio di Malaya dari tahun 1920-1959*. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. 1996.
- Anom Erman. *Dasar dan sistem akhbar era kepemimpinan Soeharto 1966-1998*. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. 2006.
- Onong Effendi. U. 2000. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- McQuail, D.T. 1987. *Mass communication theory: an introduction*. Edisi ke-2. London: Sage Publications.
- McQuail, D.T. 1983. *Mass communication theory: an introduction*. London: Sage Publications.

Penulis

 **Dr. Erman Anom** adalah Dosen senior di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Tertarik pada bidang kajian media massa dan komunikasi politik. Dapat dihubungi melalui email: erman.anom@esaunggul.ac.id.